

ANALISIS DINAMIKA KEPENDUDUKAN DALAM PERKEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN SERANG

Nurhayati Selviana Putri¹, Muthia Nazwa², Akrom³

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia ^{1,2,3}

Email: selviana.27@gmail.com¹, muthianazwa944@gmail.com²

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 6
Bulan : Juni
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Population dynamics play a fundamental role in shaping regional development, particularly in areas undergoing rapid socio-economic and administrative transformation such as Serang Regency. This study aims to analyze the relationship between population dynamics and regional development in Serang Regency through a qualitative descriptive approach. The results show that population growth of 1.24 percent per year with a total of 1.8 million people creates significant pressure on space and natural resources, reflected in the uneven population density between sub-districts. The demographic bonus predicted to peak in 2034-2035 presents a great opportunity but is hindered by an open unemployment rate of 9.18 percent and a still low Human Development Index of 73.28. Sharp spatial disparities and low digitalization of population administration at only 5.34 percent pose serious challenges in regional planning. The government responds through the revision of the 2026 Regional Spatial Plan and the 2025-2045 Regional Long-Term Development Plan with 15 development transformations. Successful management of population dynamics requires cross-sectoral collaboration and demographic data-based planning to achieve inclusive and sustainable development in Serang Regency.

Keyword: *Population Dynamics, Regional Development, Demographic Bonus, Spatial Disparity, Serang Regency*

Abstrak

Dinamika kependudukan memiliki peran fundamental dalam membentuk perkembangan wilayah, terutama di daerah yang mengalami transformasi sosial-ekonomi dan administratif yang pesat seperti Kabupaten Serang. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara dinamika kependudukan dengan perkembangan wilayah di Kabupaten Serang melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk sebesar 1,24 persen per tahun dengan jumlah 1,8 juta jiwa menciptakan tekanan signifikan terhadap ruang dan sumber daya alam, tercermin dari kepadatan penduduk yang tidak merata antar kecamatan. Bonus demografi yang diprediksi mencapai puncak pada tahun 2034-2035 menjadi peluang besar namun terhambat oleh angka pengangguran terbuka 9,18 persen dan Indeks Pembangunan Manusia yang masih rendah di angka 73,28. Ketimpangan spasial yang tajam dan rendahnya digitalisasi administrasi kependudukan (5,34 persen) menjadi tantangan serius dalam perencanaan wilayah. Pemerintah merespons melalui revisi RTRW 2026 dan RPJPD 2025-2045 dengan 15 transformasi pembangunan. Keberhasilan pengelolaan dinamika kependudukan memerlukan kolaborasi lintas sektor dan perencanaan berbasis data demografi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Serang.

Kata Kunci: *Dinamika Kependudukan, Perkembangan Wilayah, Bonus Demografi, Ketimpangan Spasial, Kabupaten Serang*

A. PENDAHULUAN

Dinamika kependudukan merupakan fenomena fundamental yang menjadi penggerak utama dalam proses perkembangan wilayah, di mana perubahan jumlah, struktur, dan persebaran penduduk secara langsung memengaruhi pola pemanfaatan ruang, kebutuhan infrastruktur, serta arah kebijakan pembangunan suatu daerah. Kabupaten Serang, sebagai salah satu wilayah dengan sejarah panjang di Provinsi Banten yang telah berdiri sejak masa Kesultanan Banten pada abad ke-16, kini menghadapi tantangan demografis yang semakin kompleks seiring dengan posisinya yang strategis sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi dan kawasan industri yang terus berkembang. (Arafat et al., 2025)

Dengan jumlah penduduk yang tercatat mencapai 1,72 juta jiwa pada tahun 2025 dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,24 persen per tahun, Kabupaten Serang menempati posisi keempat sebagai kabupaten/kota dengan populasi terbanyak di Banten, sekaligus menunjukkan kepadatan penduduk yang mencapai 1.170 jiwa per kilometer persegi. Angka-angka ini bukan sekadar statistik belaka, melainkan cerminan nyata dari tekanan demografis yang semakin hari semakin terasa terhadap ketersediaan ruang, sumber daya alam, dan kapasitas tata kelola pemerintahan di wilayah yang telah berusia hampir lima abad ini.

Struktur penduduk Kabupaten Serang menunjukkan karakteristik piramida ekspansif yang didominasi oleh kelompok usia muda, khususnya pada rentang 10-14 tahun yang mencapai 143.839 jiwa, serta proporsi penduduk usia produktif (15-59 tahun) yang sangat besar, yakni lebih dari 957 ribu jiwa yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. (BPS Provinsi Banten, 2025b) Kondisi ini menandakan adanya potensi bonus demografi yang signifikan bagi Kabupaten Serang, di mana jumlah penduduk usia produktif yang besar dapat menjadi modal pembangunan apabila dikelola dengan tepat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja. (Kuncoro, 2012)

Namun di sisi lain, struktur penduduk yang demikian juga mengandung risiko besar apabila tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Serang sendiri telah menetapkan target ambisius dalam agenda pembangunannya, yaitu menurunkan angka pengangguran terbuka menjadi 9,18 persen dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,10 pada tahun 2025, yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia sebagai bagian integral dari strategi pembangunan wilayah.

Perkembangan wilayah di Kabupaten Serang tidak dapat dipisahkan dari posisi geografisnya yang bersinggungan langsung dengan Kota Serang sebagai ibu kota provinsi, sehingga menciptakan hubungan fungsional yang erat dalam hal mobilitas penduduk, arus barang dan jasa, serta pertukaran ekonomi dan sosial budaya. Hubungan ini, di satu sisi, membuka peluang bagi Kabupaten Serang untuk menikmati efek limpahan pembangunan dari pusat pertumbuhan di Kota Serang, namun di sisi lain juga rentan menimbulkan ketimpangan spasial dan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Ketegangan administratif yang pernah terjadi antara Kabupaten Serang dan Kota Serang, misalnya terkait rencana pengambilalihan delapan pulau di Teluk Banten yang menjadi wilayah kelautan kedua daerah, menunjukkan bahwa dinamika kependudukan dan tata ruang tidak dapat dilepaskan dari isu batas wilayah, distribusi sumber daya, serta kepentingan politik dan ekonomi yang saling bersinggungan. Kesenjangan kepadatan penduduk antar kecamatan pun sangat terlihat jelas, dengan Kecamatan Ciruas sebagai wilayah terpadat mencapai 2.477 jiwa per kilometer persegi sementara Kecamatan Gunungsari hanya 505 jiwa per kilometer persegi, mengindikasikan adanya ketimpangan persebaran penduduk yang perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan tata ruang dan alokasi investasi pembangunan infrastruktur.

Tantangan pengembangan wilayah di Kabupaten Serang semakin diperumit oleh kesenjangan yang cukup tajam antara pertumbuhan penduduk yang relatif pesat dengan kesiapan infrastruktur dan layanan dasar yang tersedia bagi masyarakat. Berbagai studi menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan perencanaan wilayah yang optimal dapat menyebabkan tekanan berlebihan terhadap fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan jaringan transportasi, serta memicu ketimpangan spasial, degradasi lingkungan, dan penurunan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun data statistik menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang menggembirakan menjadi 4,48 persen pada tahun 2025 dan peningkatan IPM yang terus membaik, namun capaian digitalisasi administrasi kependudukan yang masih sangat rendah baru mencapai 5,34 persen dari target 30 persen menggambarkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam kapasitas pelayanan publik dan adopsi teknologi informasi di berbagai lapisan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kuantitatif penduduk dan perbaikan indikator makro belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan kualitas layanan dan pemerataan akses pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Serang. (Rahayuningsih, 2017)

Dengan demikian, analisis dinamika kependudukan dalam perkembangan wilayah di Kabupaten Serang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis bukti guna menjawab berbagai tantangan demografis yang dihadapi. Pemerintah Kabupaten Serang sendiri saat ini tengah melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2026 sebagai bentuk respons strategis terhadap dinamika perkembangan wilayah yang begitu cepat, percepatan pembangunan kawasan industri yang membutuhkan ruang baru, serta perubahan kebijakan penataan ruang di tingkat nasional yang terus berkembang. (Salsabila, 2025)

Pendekatan holistik yang mengintegrasikan data kependudukan secara komprehensif dengan perencanaan spasial yang partisipatif, serta melibatkan kolaborasi lintas sektor yang kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil, menjadi keniscayaan agar Kabupaten Serang dapat mengelola tekanan demografis secara bijaksana dan berkelanjutan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang dinamika kependudukan dan keterkaitannya dengan perkembangan wilayah, diharapkan Kabupaten Serang dapat mewujudkan visi pembangunannya sebagai wilayah yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing tinggi di tengah persaingan antardaerah yang semakin kompetitif di era otonomi daerah dan globalisasi ekonomi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji secara mendalam dinamika kependudukan serta keterkaitannya dengan perkembangan wilayah di Kabupaten Serang. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan, memahami, dan menginterpretasikan fenomena demografis dan spasial secara komprehensif berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan, tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik penduduk, pola persebaran, struktur demografi, serta dinamika perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, sekaligus mengungkap hubungan timbal balik antara aspek kependudukan dan perkembangan wilayah secara holistik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, data juga dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur ilmiah, jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kependudukan dan pengembangan wilayah, sehingga diperoleh data yang kaya dan mendalam untuk mendukung analisis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, seluruh data kependudukan dan perkembangan wilayah yang terkumpul diseleksi, dirangkum, dan difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti jumlah penduduk, kepadatan, struktur umur, migrasi, serta indikator pembangunan wilayah seperti ketersediaan infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta aksesibilitas wilayah. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, tabel, grafik, dan peta tematik untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi terhadap pola-pola yang muncul dari dinamika kependudukan dan perkembangan wilayah.

Analisis dilakukan dengan membandingkan data antar kecamatan, menganalisis kecenderungan dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, serta menginterpretasikan makna di balik angka-angka demografis dengan merujuk pada teori-teori kependudukan dan perencanaan wilayah yang relevan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan mendasarkan pada seluruh temuan yang diperoleh, di mana kesimpulan akhir merupakan hasil sintesis dari berbagai pola, hubungan, dan fenomena yang terungkap selama proses analisis, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana dinamika kependudukan memengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan wilayah di Kabupaten Serang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Penduduk dan Tekanan terhadap Ruang

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Serang yang mencapai 1,24 persen per tahun dengan jumlah penduduk mencapai 1,8 juta jiwa pada semester I tahun 2025 menciptakan tekanan yang semakin nyata terhadap ketersediaan ruang dan sumber daya alam yang terbatas. Kepadatan penduduk yang mencapai sekitar 1.200 jiwa per kilometer persegi menunjukkan bahwa daya dukung wilayah mulai terdesak, terutama di kawasan perkotaan seperti Kecamatan Ciruas yang mencapai 2.477 jiwa per km², Cikande 2.279 jiwa per km², dan Kragilan 2.261 jiwa per km². Kepadatan yang sangat tinggi di kecamatan-kecamatan tersebut

mengindikasikan bahwa konsentrasi penduduk tidak merata, sehingga wilayah-wilayah tertentu mengalami beban yang sangat berat dalam menyediakan ruang bagi pemukiman, fasilitas umum, dan infrastruktur dasar. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa pertumbuhan penduduk terjadi secara tidak terkendali di wilayah-wilayah yang memiliki akses terhadap pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, sementara wilayah lainnya justru mengalami stagnasi atau bahkan penurunan jumlah penduduk akibat minimnya peluang ekonomi dan akses pelayanan dasar. (Maulana & Nugroho, 2019b)

Tekanan demografis yang semakin meningkat ini berdampak langsung pada perubahan fungsi lahan yang sangat masif di Kabupaten Serang. Lahan-lahan pertanian produktif yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pedesaan secara perlahan namun pasti beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, perumahan, dan kawasan industri yang terus berkembang. Konversi lahan yang tidak terkendali ini berpotensi mengancam ketahanan pangan daerah dan menimbulkan degradasi lingkungan yang serius, seperti berkurangnya kawasan resapan air, peningkatan risiko banjir, penurunan kualitas udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati lokal. Pertumbuhan penduduk yang pesat tanpa diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai juga menimbulkan masalah sosial seperti kemacetan lalu lintas, keterbatasan akses air bersih, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat di kawasan perkotaan akibat minimnya ruang terbuka hijau dan fasilitas publik yang layak.

Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saat ini tengah memfokuskan upaya pada penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2026 sebagai respons strategis terhadap dinamika perkembangan wilayah yang sangat cepat. Proses Peninjauan Kembali yang dilakukan pada tahun 2025 mengungkapkan adanya akumulasi pemanfaatan ruang yang belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang sebelumnya, sehingga diperlukan perumusan kebijakan dan strategi baru agar pembangunan di lapangan lebih tertata dan optimal. (BPS Provinsi Banten, 2025b) Revisi RTRW ini diharapkan mampu menjadi payung hukum yang kuat bagi pembangunan infrastruktur di masa depan, sekaligus memastikan perlindungan lingkungan hidup yang tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pendekatan penataan ruang yang responsif dan berkelanjutan menjadi sebuah keniscayaan agar Kabupaten Serang dapat mengakomodasi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung yang menjadi prioritas dalam pembangunan wilayah jangka panjang.

Bonus Demografi dan Tantangan Ketenagakerjaan

Struktur penduduk Kabupaten Serang yang didominasi oleh kelompok usia produktif menunjukkan potensi bonus demografi yang sangat besar bagi pembangunan ekonomi daerah. Kabupaten Serang diperkirakan akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2034 hingga 2035, di mana jumlah penduduk usia produktif mencapai proporsi terbesar dibandingkan kelompok usia non-produktif, sehingga menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi besar ini tidak serta-merta menjadi berkah tanpa adanya perencanaan dan persiapan yang matang dari seluruh pemangku kepentingan, karena jika tidak diimbangi dengan penyediaan kebutuhan dasar dan lapangan kerja yang memadai, bonus demografi justru dapat menjadi bencana sosial-ekonomi yang ditandai dengan melonjaknya angka pengangguran, kemiskinan struktural, serta meningkatnya ketimpangan sosial di masyarakat. Kelompok usia muda yang melimpah membutuhkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta kesempatan untuk berpartisipasi secara produktif dalam pembangunan ekonomi daerah. (Maulana & Nugroho, 2019a)

Realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun jumlah angkatan kerja di Kabupaten Serang mencapai sekitar 865.899 jiwa pada tahun 2024, angka pengangguran terbuka masih berada pada angka yang cukup mengkhawatirkan yaitu 9,18 persen, yang berarti terdapat sekitar 79.521 jiwa pengangguran di tengah dominasi penduduk usia produktif. Kondisi ini semakin diperparah dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Serang yang berada pada angka 73,28 pada tahun 2024, jauh di bawah kabupaten dan kota lain di Provinsi Banten seperti Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang telah mencapai angka yang lebih tinggi. Rendahnya IPM ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan secara signifikan melalui perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat, sehingga peningkatan IPM menjadi prioritas strategis utama pemerintah daerah dalam agenda pembangunannya. Pemerintah Kabupaten Serang menargetkan peningkatan IPM menjadi 74,10 pada tahun 2025 dan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan yang telah mencapai 4,51 persen, menjadikannya angka terendah ketiga di Provinsi Banten.

Pemerintah daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025 hingga 2045 telah menyiapkan strategi transformasi pembangunan yang komprehensif untuk mengoptimalkan bonus demografi yang akan datang. Strategi tersebut mencakup pengembangan kawasan industri di wilayah timur Kabupaten Serang sebagai upaya perluasan kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif yang terus bertambah jumlahnya setiap tahun.

Selain itu, pemerintah juga memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan indeks kesehatan dengan memperluas akses layanan kesehatan berkualitas, peningkatan indeks pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah serta kualitas tenaga pendidik, serta peningkatan daya beli masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja yang layak. Bupati Serang Ratu Zakiyah secara konsisten menekankan pentingnya kolaborasi hexahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, media massa, dan agen perubahan dalam mengelola bonus demografi agar potensi penduduk usia produktif benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Serang. (BPS Provinsi Banten, 2025d)

Ketimpangan Spasial dan Mobilitas Penduduk

Kesenjangan kepadatan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Serang mencerminkan ketimpangan pembangunan wilayah yang cukup tajam dan telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Kecamatan-kecamatan yang berada di dekat pusat pertumbuhan Kota Serang dan kawasan industri mengalami kepadatan penduduk yang sangat tinggi, sementara wilayah di bagian selatan dan utara Kabupaten Serang justru relatif jarang penduduk dengan tingkat kepadatan yang jauh di bawah rata-rata kabupaten. Kecamatan Ciruas sebagai ibu kota kabupaten mencatat kepadatan penduduk mencapai 2.477 jiwa per kilometer persegi, sementara Kecamatan Gunungsari di sisi lain hanya memiliki sekitar 505 jiwa per kilometer persegi, menunjukkan disparitas yang sangat signifikan dalam hal konsentrasi penduduk dan akses terhadap berbagai layanan publik. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi pada aspek kependudukan semata, tetapi juga berdampak langsung pada distribusi infrastruktur, ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta peluang ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan sekitar kawasan industri.

Mobilitas penduduk yang tinggi antara Kabupaten Serang dan Kota Serang didorong oleh perbedaan ketersediaan lapangan kerja dan akses layanan publik yang berkualitas, sehingga menciptakan pola interaksi fungsional yang sangat kompleks antara kedua wilayah yang saling beririsan. Secara administratif, Kabupaten Serang berbatasan langsung dengan Kota Serang di sebelah barat, tepatnya dengan Kecamatan Kramatwatu, Waringinkurung, dan Pabuaran, sementara di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Ciruas, dan Kragilan, sehingga hubungan spasial antara kedua daerah ini sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Ketegangan administratif yang terjadi terkait pemanfaatan ruang dan sumber daya, seperti yang terjadi dalam perdebatan tentang

pengelolaan pulau-pulau di Teluk Banten, semakin memperjelas kompleksitas hubungan fungsional antara kabupaten dan kota yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tata ruang yang terintegrasi secara holistik.

Pemerintah Kabupaten Serang melalui proses revisi RTRW tahun 2026 dan penyusunan RPJPD tahun 2025 hingga 2045 berupaya merespons ketimpangan spasial ini dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai wilayah untuk mendorong pemerataan pembangunan yang lebih berkeadilan. Strategi pengembangan kawasan industri di wilayah timur, pengembangan kawasan pertanian di wilayah utara dan selatan, serta pengembangan kawasan minapolitan dan pelabuhan di Lontar merupakan upaya konkret untuk mendistribusikan kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di luar kawasan perkotaan yang sudah sangat padat. Pendekatan perencanaan wilayah yang terintegrasi antara Kabupaten Serang dan Kota Serang menjadi sangat penting untuk mengelola mobilitas penduduk yang terus meningkat dan mengurangi ketimpangan spasial yang telah mengakar, sehingga tercipta sinergi pembangunan yang saling menguntungkan bagi kedua wilayah dalam kerangka pengembangan Provinsi Banten secara keseluruhan.

Digitalisasi Administrasi Kependudukan dan Kesenjangan Pelayanan

Meskipun jumlah penduduk Kabupaten Serang mencapai 1,8 juta jiwa pada semester I tahun 2025, capaian Identitas Kependudukan Digital masih sangat rendah, baru mencapai 5,34 persen atau sekitar 68.222 warga dari total 1,2 juta wajib KTP yang ditargetkan mencapai 30 persen. Rendahnya adopsi teknologi dalam administrasi kependudukan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan, yaitu keterbatasan infrastruktur digital dan kepemilikan ponsel cerdas di wilayah pedesaan yang masih sangat minim, masih kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap KTP fisik dibandingkan dokumen digital yang dianggap kurang aman, serta minimnya pemahaman tentang fungsi dan manfaat IKD di kalangan masyarakat luas. (Rahayuningsih, 2017) Banyak masyarakat yang merasa lebih aman dan nyaman dengan KTP fisik karena masih banyak lembaga dan instansi baik pemerintah maupun swasta yang mensyaratkan dokumen fisik sebagai persyaratan administrasi, sehingga transisi menuju digitalisasi menghadapi hambatan budaya dan struktural yang cukup signifikan dan tidak mudah diatasi dalam waktu singkat.

Kesenjangan digital dalam administrasi kependudukan ini sebenarnya mencerminkan ketimpangan akses pelayanan publik yang lebih luas antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Serang, di mana masyarakat di daerah terpencil masih tertinggal jauh dalam mengakses layanan berbasis teknologi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Serang telah merespons berbagai tantangan ini dengan meluncurkan berbagai strategi inovatif, termasuk program pelayanan jemput bola yang menysasar 326 desa, gebyar administrasi kependudukan di berbagai lokasi strategis, serta perekaman KTP di sekolah-sekolah bagi anak-anak usia 16 hingga 17 tahun untuk meningkatkan cakupan kepesertaan IKD. Namun, berbagai upaya ini masih menghadapi kendala yang sangat signifikan karena masih banyak masyarakat pedesaan yang belum memiliki handphone pintar dan belum sepenuhnya percaya pada sistem digitalisasi yang dianggap asing dan rumit, sehingga target 30 persen capaian IKD hingga akhir tahun 2025 diperkirakan masih akan jauh dari harapan dan memerlukan strategi yang lebih agresif.

Rendahnya capaian digitalisasi administrasi kependudukan ini berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam menyediakan layanan administrasi yang efisien, cepat, dan merata bagi seluruh masyarakat, serta menyulitkan perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan yang akurat dan real-time. IKD sebenarnya memiliki tiga fungsi penting yang sangat strategis, yaitu untuk pembuktian identitas melalui verifikasi data, autentikasi identitas melalui verifikasi biometrik dan QR code, serta otorisasi identitas untuk mengakses data penduduk secara digital, yang semuanya bertujuan untuk mengamankan kepemilikan identitas dan mencegah pemalsuan serta kebocoran data yang marak terjadi. Percepatan digitalisasi administrasi kependudukan di Kabupaten Serang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, tidak hanya dari sisi penyediaan infrastruktur dan sosialisasi yang masif, tetapi juga perubahan regulasi di tingkat nasional dan daerah yang mewajibkan penerimaan IKD sebagai identitas resmi di semua sektor pelayanan publik dan privat, sehingga masyarakat terdorong untuk beralih dari sistem konvensional ke sistem digital.

Perencanaan Wilayah Berbasis Demografi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Dinamika kependudukan yang sangat kompleks di Kabupaten Serang menuntut perencanaan wilayah yang berbasis data demografi yang akurat dan terkini, serta melibatkan kolaborasi lintas sektor secara holistik, mengingat tekanan penduduk yang terus meningkat terhadap ruang, sumber daya alam, dan layanan publik yang semakin terbatas. Pemerintah Kabupaten Serang melalui RPJPD tahun 2025 hingga 2045 telah menyiapkan 15 transformasi super pembangunan yang mencakup berbagai sektor strategis, antara lain pengembangan kawasan industri di wilayah timur untuk perluasan lapangan kerja, pengembangan kawasan pertanian di utara dan selatan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, serta pengembangan kawasan minapolitan dan pelabuhan di Lontar sebagai strategi pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing ekonomi daerah. Visi pembangunan Kabupaten

Serang Bahagia yang dicanangkan Bupati Ratu Rachmatuzakiah dengan enam misi utama, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah, penguatan iklim investasi yang kondusif, peningkatan kapasitas fiskal daerah, tata kelola pemerintahan yang prima dan transparan, serta peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat, menjadi kerangka strategis dalam mengelola tekanan demografis dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (BPS Provinsi Banten, 2025c)

Revisi RTRW Kabupaten Serang tahun 2026 yang sedang berjalan merupakan respons langsung terhadap dinamika perkembangan wilayah yang sangat cepat dan percepatan pembangunan kawasan industri serta infrastruktur yang membutuhkan payung hukum dan arahan spasial yang jelas dan adaptif terhadap perubahan. Peninjauan kembali RTRW dilakukan setiap lima tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, dan hasil Peninjauan Kembali pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang di Kabupaten Serang belum sepenuhnya sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga diperlukan revisi total untuk menghasilkan RTRW yang lebih responsif, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi. Selain dokumen utama RTRW, pemerintah daerah juga tengah menyusun dokumen pendukung yang sangat krusial seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Naskah Akademik, dan Rancangan Peraturan Daerah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tata ruang yang diambil memperhatikan aspek lingkungan hidup secara komprehensif dan berkelanjutan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif di masa depan.

Kolaborasi hexahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, media massa, dan agen perubahan menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola tekanan demografis dan mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Serang. Bupati Serang secara konsisten menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam setiap forum perencanaan pembangunan, termasuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mensinkronkan program pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pendekatan partisipatif dan berbasis data demografi yang akurat dalam perencanaan wilayah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat, sehingga Kabupaten Serang dapat mengelola bonus demografi secara optimal, mengurangi kesenjangan antarwilayah yang selama ini terjadi, serta meningkatkan kualitas hidup

masyarakat secara berkelanjutan di tengah persaingan antardaerah yang semakin kompetitif di era otonomi daerah dan globalisasi ekonomi yang tidak dapat dihindari.

D. KESIMPULAN

Dinamika kependudukan di Kabupaten Serang menunjukkan kompleksitas yang tinggi dengan pertumbuhan penduduk mencapai 1,24 persen per tahun dan jumlah populasi 1,8 juta jiwa, yang menciptakan tekanan signifikan terhadap ruang, sumber daya alam, dan layanan publik di wilayah tersebut. Bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2034-2035 menjadi peluang besar sekaligus tantangan serius, mengingat angka pengangguran terbuka yang masih tinggi sebesar 9,18 persen dan Indeks Pembangunan Manusia yang masih rendah di angka 73,28. Ketimpangan spasial yang tajam antar kecamatan, dengan kepadatan tertinggi di Ciruas mencapai 2.477 jiwa per km² dan terendah di Gunungsari hanya 505 jiwa per km², mencerminkan ketidakmerataan pembangunan yang perlu segera diatasi melalui perencanaan tata ruang yang lebih berpihak pada pemerataan. Digitalisasi administrasi kependudukan yang baru mencapai 5,34 persen juga menjadi pekerjaan rumah besar yang menghambat efisiensi pelayanan publik dan akurasi data perencanaan, sementara upaya pemerintah melalui revisi RTRW 2026 dan RPJPD 2025-2045 dengan 15 transformasi super pembangunan merupakan langkah strategis yang perlu terus diperkuat.

Keberhasilan pengelolaan dinamika kependudukan di Kabupaten Serang sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam kerangka hexahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan agen perubahan. Pendekatan perencanaan wilayah yang berbasis data demografi akurat dan partisipatif menjadi kunci untuk mengoptimalkan bonus demografi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Serang perlu terus memperkuat koordinasi dengan Kota Serang dalam pengelolaan ruang dan sumber daya, mengakselerasi digitalisasi administrasi kependudukan dengan pendekatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan tata ruang memperhatikan aspek lingkungan hidup melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang komprehensif. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dan implementasi kebijakan yang tepat sasaran, Kabupaten Serang dapat mengelola tekanan demografis secara bijaksana dan mewujudkan visi Kabupaten Serang Bahagia yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing tinggi di tengah persaingan antardaerah yang semakin kompetitif.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Maulana, M., & Kusumoningtyas, A. A. (2025). Dampak kenaikan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Serang tahun 2022-2023. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 13(2), 225-245. <https://doi.org/10.55678/prj.v13i2.2098>
- Arafat, Y., Rafillah, R. A., Tahir, D. A., Dari, D. W., Natasya, A. B., & Ulum, I. M. (2025). Analisis kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan: Studi kasus Kota Serang dan Desa Cikedung, Kabupaten Serang. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5). <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5383>
- BPS Provinsi Banten. (2025). Banten Province in Figures 2025. BPS-Statistics of Banten Province.
- BPS Provinsi Banten. (2025). Human Development Index (HDI) of Banten Province in 2025. BPS-Statistics of Banten Province.
- BPS Provinsi Banten. (2025). Indikator Makro Provinsi Banten Semester I 2025. BPS Provinsi Banten.
- BPS Provinsi Banten. (2025). Population Aged 15 Years and Over by Type of Employment Activity and Regional Classification in Banten Province (people), 2025. BPS-Statistics Indonesia.
- Kabupaten Serang. (2020). Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031. Lembaran Daerah Kabupaten Serang.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. (2021a). Laporan KLHS tahun 2021. Kementerian ATR BPN.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. (2021b). Rencana detail tata ruang (RDTR) wilayah Kecamatan Kramatwatu. Kementerian ATR BPN.
- Kuncoro, M. (2012). Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Mengatasi Ketimpangan dan Membangun Daya Saing. Erlangga.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1-28.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019a). Kebijakan publik (Cara mudah memahami kebijakan publik). CV. AA. Rizky.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019b). Kebijakan publik. CV. AA. Rizky.

- Moleong, J. L. (2005). Metodologi penelitian kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pratiwi, M. A. A. (2025). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten (Skripsi). UPN Veteran Jawa Timur.
- Putra, A. R. (2020). Ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Banten: Studi kasus Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 145-160.
- Rahayuningsih, Y. (2017). Dampak sosial keberadaan industri terhadap masyarakat sekitar kawasan industri Cilegon. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 1(1), 13-26.
- Salsabila, N. (2025). Pengaruh pertumbuhan industri, investasi, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi Banten (Skripsi). UPN Veteran Jakarta.